

EKONOMI DAN LINGKUNGAN HIDUP

Miguel de Cervantes Saavedra, penulis *Don Quixote de la Mancha* dari Spanyol pernah mengatakan bahwa “kepuasan atas kemakmuran bukanlah sekadar pada kepemilikan dan pengeluarannya yang glamor, namun lebih kepada cara memanfaatkannya secara bijak”. Saavedra mengemukakan hal ini ketika Spanyol tengah mabuk-mabuknya menikmati kekayaan mineral yang dibawa oleh para “Spanish explorer” dari benua Amerika. Saavedra memang belum mengenal fenomena “resource curse” (kutukan sumber daya) dan penyakit Belanda (*Dutch Disease*) yang belakangan muncul di negara-negara penghasil sumber daya alam, seperti mineral, minyak dan gas alam.

Sejak pertama kali muncul di majalah *the Economist* pada Tahun 1977, fenomena *Dutch Disease*, adalah sintesis yang sangat populer untuk menggambarkan paradoks pertumbuhan yang lamban di negara yang kaya dengan sumber daya alam. Sintesis ini kemudian diperkuat oleh tulisan Richard Auty pada tahun 1993 tentang *Sustaining Development in Mineral Economies: The Resource Curse Thesis*. Tesis *Resource Curse* mencoba menjelaskan fenomena mengapa negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah tidak mampu memanfaatkan kekayaan tersebut untuk meningkatkan kemakmuran ekonominya, sehingga mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dari pada negara-negara dengan sumber daya alam yang sedikit.

Indonesia adalah negara yang barangkali bagi sebagian kalangan terkena fenomena *Dutch Disease* dan *Resource Curse* tersebut. Dengan sumber daya alam dan kekayaan lingkungan yang begitu tinggi, Indonesia masih belum juga mampu mengembangkan ekonominya sejajar dengan negara-negara maju yang bahkan sebenarnya tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah. Lalu apakah benar Indonesia terjebak dalam fenomena *Dutch Disease* dan *Resource Curse*? Ataukah ada faktor lain yang lebih fundamental? Ada catatan menarik yang ditulis oleh Gavin Wright dan Jese Czelusta, ekonom dari Stanford University, yaitu bahwa *Dutch Disease* dan *Resource Curse* adalah pendekatan *black box* yang sering merancukan antara *comparative advantage* dengan *resource abundance*. Fenomena *resource curse* dapat menjadi fenomena yang anomali. Sumber daya alam sendiri bukanlah sesuatu yang harus di “blame” terhadap terjadinya pertumbuhan ekonomi yang lamban. Yang penting justru bagaimana para pengambil kebijakan dan pengelola sumber daya alam menentukan langkah kebijakan yang tepat, yakni bukan saja kebijakan ekonomi terhadap sumber daya alam yang

berkelanjutan, namun juga bersikap bijak terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkannya. Degradasi lingkungan bukan hanya akan berdampak pada perubahan kualitas lingkungan itu sendiri, namun juga akan memberikan umpan balik yang negatif terhadap pembangunan ekonomi secara makro.

Kerusakan lingkungan dan degradasi sumber daya alam telah menjadi berita yang sering terdengar belakangan ini. Kerusakan lingkungan bukan saja akan mengurangi kemampuan sumber daya alam dan jasa lingkungan dalam menyuplai kebutuhan manusia, namun juga memiliki konsekuensi yang cukup dalam di tengah penderitaan yang diderita oleh masyarakat akibat kerusakan lingkungan, seperti kekeringan dan kekurangan pangan. Belum lagi kalau dihitung biaya sosial yang begitu besar yang ditanggung oleh masyarakat akibat kerusakan lingkungan yang terjadi.

Berbagai pihak mengklaim bahwa secara kualitatif, ada kecenderungan yang meningkat terhadap kerusakan alam yang terjadi di wilayah Indonesia. Kecenderungan ini dalam beberapa hal dipicu oleh semakin meningkatnya kebutuhan ekonomi dengan terus meningkatnya pertumbuhan penduduk. Dengan demikian bukan saja pada jumlah sumber daya alam dan lingkungan yang semakin banyak dikonsumsi namun juga intensitas yang semakin meningkat. Sifat sumber daya alam yang merupakan barang publik kemudian menimbulkan eksternalitas yang berakibat pada over consumption dan over extraction terhadap sumber daya alam dan lingkungan.

Sumber daya alam dan lingkungan (SDAL) merupakan aset yang menghasilkan arus barang dan jasa, baik yang dapat dikonsumsi langsung maupun tidak untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam dalam beberapa hal juga merupakan barang publik (public good) yang hak pemilikannya tidak terkuatkan dengan jelas. Konsumsi yang berlebihan dan kerusakan lingkungan merupakan derivative dari ketidakjelasan hak pemilikan tersebut yang pada akhirnya menimbulkan eksternalitas (spillover effect), yakni tindakan satu pihak yang merugikan pihak lain tidak terkoreksi oleh mekanisme pasar. Kondisi ini menyebabkan upaya untuk memperbaiki kerusakan lingkungan merupakan pekerjaan reversing the irreversible, mengembalikan sesuatu yang sulit dikembalikan. Sekali SDAL rusak maka akan sangat mustahil mengembalikannya ke kondisi semula.

Dalam konteks ekonomi, peringatan ini sudah sejak lama disampaikan oleh seorang ekonom brilian bernama Nicolas Georgescu-Roegen pada tahun 1970, ketika itu Nicolas mempublikasikan Magnum Opus nya berjudul *The Entropy Law and the Economic Process*.

Ekonom handal Paul Samuelson bahkan menyebut Nicolas Georgescu-Roegen sebagai “an economist’s economist” (ekonomnya ekonom) karena kebriliannya dalam mengedepankan ide yang jauh melebihi masanya pada waktu itu. Dalam pandangan Georgescu-Roegen, kegiatan ekonomi secara fundamental merupakan order creation yang mengikuti hukum termodinamika, yakni hukum mengenai entropi dan irreversibility. Dalam konteks ini Georgescu-Roegen melihat bahwa pendekatan ekonomi neoklasik mengabaikan sama sekali peran entropi dalam ekonomi. Dengan melawan hukum entropi inilah kemudian kegiatan ekonomi banyak menimbulkan eksternalitas dan degradasi lingkungan yang sering missing dalam pendekatan neo klasikal. Belakangan para ekonom kemudian menyadari kekeliruan mengabaikan kontribusi Georgescu-Roegen ini, dan gelombang perubahan pun dimulai dengan mengembalikan kembali prinsip ekonomi ke dalam prinsip entropi.

Kerusakan terhadap SDAL secara garis besar dipicu oleh dua faktor. Pertama pola konsumsi (consumption pattern) dan yang kedua sering disebut sebagai policy failure (kegagalan kebijakan). Pola konsumsi yang tinggi akan memicu permintaan yang tinggi terhadap sumber daya alam yang pada gilirannya akan menyebabkan environmental stress. Studi oleh Parikh (1992) tentang pola konsumsi dan kerusakan lingkungan menunjukkan bahwa negara maju dengan 24 persen total penduduk dunia mengonsumsi 50 persen sampai 90 persen komoditas dunia. Bahkan konsumsi energi mereka 20 kali lebih besar daripada negara berkembang. Tingginya konsumsi per kapita ini harus dipenuhi tidak saja dari sumber daya alam negara maju, tetapi juga dari negara berkembang melalui perdagangan internasional. Industri-industri di negara berkembang dengan motif memperoleh devisa yang tinggi kemudian secara sporadis memacu produksi untuk kebutuhan konsumsi tersebut dengan sering mengabaikan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.

Di sisi lain, sebagian besar penduduk negara berkembang, seperti Indonesia khususnya, yang berada dekat dengan sumber daya alam, seperti di wilayah pesisir merupakan penduduk yang sering dikategorikan miskin. Kemiskinan dan ketidakpastian hidup menyebabkan pola pemanfaatan sumber daya alam tidak terkendali, bahkan destruktif. Oleh sebab itu, tidaklah mengherankan bahwa hampir 80 persen kondisi terumbu karang Indonesia, yang sangat bernilai tinggi, dalam kondisi sangat mengesankan akibat pemanfaatan yang destruktif.

Ketidakseimbangan produksi sumber daya alam dan konsumsi manusia juga ditekankan oleh ekonom Jeffrey Sachs. Dalam tulisannya mengenai the Rationing Cost of Nature, Sachs menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi telah mendorong harga-harga sumber daya alam

yang kemudian melonjak secara tajam batas-batas fisik dan biologi dari sumber daya alam, seperti lahan, kayu, minyak, produk-produk perikanan, serta suplai air bersih. Sach juga menekankan bahwa meskipun banyak penyebab dari meningkatnya tekanan terhadap sumber daya alam sehingga meningkatkan harga, namun yang paling dramatis adalah peningkatan konsumsi dunia terhadap produk-produk sumber daya alam. Dari sisi sumber daya tidak terbarukan, peningkatan konsumsi seperti minyak (BBM) meningkat tajam dari sekitar 470 juta ton pada tahun 1950-an menjadi 4000 juta ton pada tahun 2005. Demikian juga konsumsi batu bara dan gas meningkat terus dari 1074 MTOE pada tahun 1950 menjadi 2600 MTOE pada tahun 2004 untuk batu bara dari 471 MTOE pada periode 1950 menjadi 2300 MTOE untuk gas. Tren dunia ini sedikit banyak juga sejalan dengan tren konsumsi Indonesia untuk kedua komoditas tersebut. Demikian pula halnya dengan konsumsi sumber daya alam terbarukan, seperti hutan dan ikan keduanya mengalami tren yang serupa. Produksi perikanan tangkap dunia misalnya mengalami lonjakan dari 19 juta ton pada tahun 1950-an menjadi lebih dari 90 juta ton pada tahun 2000-an.

Sejalan dengan tren produksi dan konsumsi yang terus meningkat seperti disebutkan di atas, progres ekonomi juga membawa biaya ekologi dan sosial yang cukup mahal. Tren konsumsi BBM dan deforestasi yang terus meningkat diikuti pula oleh meningkatnya indikator perubahan iklim. World Watch Institute mencatat bahwa sampai tahun 2004 pembakaran bahan bakar fosil melepaskan lebih dari 7 miliar ton karbon, suatu peningkatan yang tajam dari tahun 1950an yang masih di bawah 2 miliar ton. Emisi karbon dari bahan bakar fosil ini diyakini sebagai faktor utama dibalik meningkatnya suhu udara global.

Sebagaimana disebutkan di atas, hal kedua menyangkut kerusakan lingkungan dipicu oleh terjadinya kegagalan kebijakan (policy failure) atau dalam bahasa Opschoor (1994) sering disebut sebagai government failure yang melahirkan kekeliruan terhadap pengelolaan SDAL. Kebijakan ekonomi yang mengarah ke rent seeking behavior ditambah dengan inefisiensi birokrasi menyebabkan institusi publik tidak dapat diandaikan untuk mengoreksi penyimpangan-penyimpangan kegiatan ekonomi yang merusak lingkungan. Kebijakan ekonomi di negara-negara berkembang lebih diarahkan pada kebijakan ekonomi yang sifatnya market friendly atau lebih mementingkan pasar. Dengan demikian, implementasi kebijakan ini sering berbenturan dengan masalah lingkungan karena adanya komponen jasa lingkungan yang tidak terekam dalam pasar (non-marketed).

Kebijakan ekonomi yang bersifat market friendly adalah “necessary condition” sementara kebijakan ekonomi yang bersifat environmental friendly merupakan “sufficient condition” bagi pembangunan ekonomi Indonesia di masa mendatang. Mengapa kebijakan ekonomi yang environmental friendly ini diperlukan? Berbagai peristiwa menyangkut menurunnya kualitas lingkungan seperti kasus pencemaran akibat penambangan di Teluk Buyat, penggundulan dan kebakaran hutan, polusi udara, pencemaran wilayah pesisir dan lain sebagainya menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi yang hanya memenuhi keinginan pasar semata pada akhirnya hanya akan mengorbankan kualitas sumber daya alam dan lingkungan. Dan manakala sumber daya alam dan lingkungan telah terdegradasi, maka akan menjadi bumerang bagi pertumbuhan ekonomi itu sendiri.

Sejarah telah membuktikan bagaimana kebijakan ekonomi yang tidak “environmental friendly” juga telah menjadi pemicu kehancuran suatu bangsa. Sebagai contoh, meski Edward Gibbon menyatakan bahwa barbarisme dan konflik etika menjadi penyebab jatuhnya kekaisaran Romawi Kuno, namun studi oleh Dale dan Carter menunjukkan bahwa degradasi lahan yang disebabkan oleh pembangunan ekonomi yang berlebihan justru menjadi katalis bagi runtuhnya kekaisaran tersebut. Studi lain oleh Naveh (1974) dan Hughes (1975) serta Groenman-van Waateringe (1983) kesemuanya membuktikan bahwa destruksi sumber daya alam dan lingkungan menjadi penyebab runtuhnya peradaban-peradaban di masa lalu. Contoh lain yang cukup spektakuler adalah hancurnya kerajaan Angkor di Kamboja pada awal abad pertengahan. Kerajaan yang pada waktu itu merupakan advanced civilization (penduduk London pada periode yang sama cuma 20.000 jiwa, sementara Angkor sudah berpenduduk hampir 200.000 jiwa) dengan sistem ekonomi yang tertata rapi dan irigasi pertanian yang terbilang modern, dalam kurun waktu 200 tahun kemudian tenggelam. Setelah diteliti lebih dalam, kehancuran peradaban tersebut ternyata dipicu oleh pertumbuhan ekonomi yang overheating tanpa mengindahkan daya dukung lingkungan (environmental carrying capacity) yang ada.

Demikian juga pada peradaban modern saat ini, meski terlihat perkembangan teknologi dan pertumbuhan ekonomi yang menakjubkan yang tidak pernah dicapai pada abad-abad sebelumnya, namun peningkatan standar hidup tersebut juga harus dibayar mahal oleh peningkatan degradasi sumber daya alam dan lingkungan yang tidak pernah dialami sebelumnya. Sebagai contoh, kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh pencemaran di wilayah pesisir tidaklah sedikit. United Nation Environment Program (UNEP) memperkirakan bahwa

kerugian ekonomi global dalam bentuk penyakit dan kematian yang diakibatkan oleh pencemaran laut telah mencapai lebih dari US\$ 12,8 miliar per tahun. Nilai ini hampir mendekati separuh dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program konservasi global dalam rangka menjaga ekosistem dunia dalam kondisi yang sehat.

Terdapat beberapa alasan penting mengapa kebijakan ekonomi yang bersifat *environmental friendly* ini ke depan sangat dibutuhkan, khususnya bagi Indonesia yang sedang mengalami momentum perubahan. Pertama, pendekatan kebijakan ekonomi yang mengandalkan *market friendly* semata akan mengalami defisiensi akibat fenomena Newtonian di dalam ilmu ekonomi itu sendiri.

Fenomena yang dipinjam dari Edward Olson tersebut mengacu pada situasi sebagaimana hukum fisika bahwa teori ekonomi dibangun dari model yang sederhana untuk memaknai perilaku pasar serta *arrangement* ekonomi yang kompleks. Sama halnya dengan hukum fundamental fisika sendiri yang tidak cukup untuk membangun sebuah pesawat terbang, demikian juga halnya teori keseimbangan umum ekonomi pun tidak cukup digunakan untuk memenuhi keinginan perilaku ekonomi dalam kondisi optimal dan stabil. Dengan demikian akibat fenomena Newtonian tersebut pendekatan ekonomi yang *market friendly* sekalipun tidak akan cukup untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus utama masyarakat global menyangkut peranan sumber daya alam, penurunan kualitas sumber daya, dan lingkungan serta kuatnya pengaruh eksternalitas terhadap menurunnya kualitas lingkungan global.

Perlu pula disadari bahwa kebijakan ekonomi yang berorientasi pasar semata, dalam jangka panjang akan memicu pola konsumsi yang tinggi yang kemudian menyebabkan permintaan yang tinggi terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh sumber daya alam. Kedua kekuatan tersebut akan menyebabkan terjadinya tekanan yang berat terhadap lingkungan atau *environmental stress*. Studi yang dilakukan oleh Jyoti Pankh (United Nation Conference on Environment and Development, UNCED) misalnya menjelaskan keterkaitan antara pola konsumsi dan kerusakan lingkungan ini terjadi, ia menunjukkan bahwa negara maju dengan 24 persen total penduduk dunia membutuhkan konsumsi 50 persen sampai 90 persen komoditas dunia. Tingginya konsumsi per kapita negara maju tersebut tidak saja harus dipenuhi dari sumber daya alamnya tetapi juga dipenuhi dari negara-negara berkembang melalui perdagangan internasional. Vandana Shiva, seorang *environmentalist* yang sangat

disegani dunia bahkan kemudian menggambarkan situasi ini dalam bukunya *Stolen Harvest* sebagai pembajakan pangan oleh negara maju atas negara berkembang.

Kedua, pendekatan kebijakan ekonomi yang market friendly juga cenderung bersifat hermetic artinya cenderung terisolasi dari kompleksitas perilaku manusia dan kendala lingkungan. Akibatnya meski indikator-indikator ekonomi yang mengacu ke keinginan pasar dapat dengan mudah diprediksi dengan model-model yang canggih dan kompleks, namun sering menemui kegagalan. Ini terjadi karena sifat hermetic dari pendekatan kebijakan yang bersifat market friendly semata tanpa melihat perubahan institusi yang mengatur dan mengendalikan sumber daya alam dan lingkungan.

Dengan melihat beberapa defisiensi kebijakan ekonomi market friendly di atas, maka dual approach antara kebijakan ekonomi yang bersifat market friendly dan environmental friendly sangatlah diperlukan. Pada kebijakan ekonomi yang mengandalkan pasar semata maka indikator ekonomi diarahkan untuk mengekspansi batas-batas subsistem ekonomi sehingga menembus keseluruhan sistem lingkungan yang ada. Tujuan pendekatan ini adalah sistem ekonomi makro secara keseluruhan dengan menginternalisasikan seluruh masalah yang ditimbulkan, sehingga seolah-olah “everything is market edible” (seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh sumber daya alam dan lingkungan dapat daya alam dan lingkungan dapat ditransaksikan di pasar). Sebaliknya pada sistem yang mengedepankan konservasi semata, maka ruang gerak ekonomi dipersempit sehingga porsi lingkungan menjadi besar. Pendekatan ini pun menjadi absurd manakala dihadapkan pada situasi negara berkembang seperti Indonesia yang membutuhkan pertumbuhan ekonomi tinggi tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat namun juga untuk memperbaiki lingkungan dan menyelamatkan sumber daya alam dan lingkungan.

Dual approach mencoba mengakomodasikan kekurangan-kekurangan dari kedua pendekatan tersebut dengan mengendalikan ekosistem dan lingkungan dengan cara menginjeksi penurunan kualitas dan kuantitas lingkungan dari manfaat yang diperoleh dari sistem ekonomi. Pendekatan ini juga dapat mendelineasi batasan- batasan untuk kebijakan pasar dapat dijalankan atau tidak dapat diterapkan.

Dengan kata lain, perturbasi (gangguan) yang terjadi pada sistem lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas ekonomi dapat diakomodasikan dalam struktur kebijakan ekonomi makro yang ada. Di sisi lain, ekstraksi dan degradasi sumber daya alam dan lingkungan juga menjadi loop dalam interkoneksi antara sistem ekonomi dan sistem lingkungan, dengan

demikian sistem ekonomi akan bersifat resource friendly, sementara sistem lingkungan juga dapat diakomodasikan untuk memenuhi kebutuhan pasar dengan melihat feedback degradasi lingkungannya. Pada dual approach ini juga tidak dilupakan sistem sosial yang menjadi penunjang keseimbangan dua sistem ekonomi dan lingkungan termasuk didalamnya aspek institusi yang mengendalikan preferensi dan aturan main yang mengatur perubahan kualitas lingkungan.

Pendekatan yang menengahkan dual approach bukan saja dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi masyarakat dan keberlanjutan SDAL, namun lebih dari itu pendekatan ini juga dibutuhkan untuk menjaga proses sosial dan kestabilan institusi. Bukti-bukti studi terkini (misalnya Barbier dan Dixon, 1996) menunjukkan bahwa di beberapa negara berkembang, deplesi dan degradasi SDAL seperti hutan, air, perikanan dan sebagainya menjadi faktor pemicu terjadi destabilisasi institusi dan pertumbuhan ekonomi yang rendah. Kelangkaan sumber daya di negara berkembang seperti Indonesia, sudah cukup untuk menjadi pemicu konflik dan friksi sosial yang akan mengganggu keseimbangan institusi dan kebijakan ekonomi yang dibutuhkan untuk proses pembangunan itu sendiri. Bukti-bukti yang terjadi di Bangladesh dan Haiti, misalnya menunjukkan bahwa deplesi dan degradasi sumber daya telah memicu "social struggle" dan melahirkan perilaku rent seeking behavior (pemburu rente). Gejala-gejala seperti ini pun sudah terjadi di Indonesia dengan otonomi daerah menyebabkan ekstraksi SDAL sedemikian rupa untuk memenuhi tujuan kebijakan ekonomi yang memenuhi pasar semata, sehingga melahirkan perilaku-perilaku rent seeking pada tingkat pemerintahan lokal. Investasi di bidang ekstraksi SDAL dipacu dengan membangun industri berbasis SDAL untuk mengejar peningkatan asli daerah. Sebagai contoh di beberapa daerah dengan potensi pasar yang menggiurkan dari pengerukan pasir laut menyebabkan ekstraksi sumber daya tersebut pada taraf yang mengkhawatirkan dengan tidak mengindahkan kaidah-kaidah lingkungan dan hukum ekstraksi sumber daya alam. Kondisi ini pada gilirannya menyebabkan friksi sosial antara berbagai pihak (nelayan dan pengusaha pasir laut) dan terdegradasinya ekosistem pesisir ketika penambangan tersebut merambah ke wilayah pantai. Dan manakala lingkungan telah terdegradasi, masyarakat harus membayar biaya sosial akibat kerusakan lingkungan tersebut. Fenomena CCPP (baca double C double P) yang artinya Commonize Cost, Privatize Profit yakni industri sering tidak peduli dengan biaya sosial yang ditimbulkan oleh kerusakan lingkungan sudah semestinya dihilangkan. Sudah sewajarnya industri (pengusaha) juga harus menanggung biaya kerusakan lingkungan yang terjadi (spread the pain). Intinya adalah bahwa masalah lingkungan, dalam bahasa latin,

disebut sebagai Caveat Venditor yang artinya pihak yang memproduksi kerusakan lingkungan harus bertanggung jawab dan memberikan kompensasi terhadap timbulnya defect yang terjadi pada natural capital.

Akhirnya, banyak bukti hasil studi yang menunjukkan eratnya keterkaitan antara penanganan kebijakan ekonomi sumber daya alam dengan kestabilan politik di suatu negara. Hasil studi Deacon (1994) di 120 negara misalnya menunjukkan bahwa penggundulan hutan (deforestation) dan degradasi lahan yang terjadi di negara- negara tersebut dipicu oleh iklim politik yang memicu investasi pada keinginan pasar semata. Akibatnya justru menimbulkan gejolak politik (politic turmoil) yang dapat menjadi “wash out effect” atau pencuci keberhasilan- keberhasilan pembangunan ekonomi itu sendiri.